

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Lingkungan hidup menurut UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kerusakan lingkungan hidup merupakan masalah yang mengkhawatirkan di Indonesia.

Manusia merupakan pelaku utama dalam permasalahan lingkungan dengan segala kegiatannya. Setiap kegiatan manusia akan menghasilkan sisa atau buangan yang biasa disebut sampah. Persoalan sampah tak kunjung selesai disebabkan oleh tingginya kepadatan penduduk dan konsumsi masyarakat yang tinggi khususnya di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2016 jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 65,2 juta ton per tahun, jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pertambahan jumlah timbulan sampah terjadi sangat cepat, hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2002 penduduk perkotaan menghasilkan 0,64 kg/orang/hari dan pada tahun 2012 jumlah timbulan sampah meningkat menjadi 1,2 kg/orang/hari (World Bank, 2012). Di Indonesia sekitar 60% komposisi sampah berupa sampah organik dan 14% sampah plastik. Sumber sampah terbanyak berasal dari pasar tradisional yang memproduksi 95% sampah organik. Sementara itu, sampah di daerah permukiman lebih beragam, adapun komposisi sampahnya yaitu sekitar 75% sampah organik dan sisanya sampah anorganik (Tim Penulis PS, 2008). Pada tahun 2019 jumlah timbulan sampah di Provinsi Jawa tengah yaitu sebanyak 4.874.479,43 m<sup>3</sup>/hari (Menlhk, 2019). Semakin hari jumlah sampah semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan gaya hidup yang semakin konsumtif. Oleh

karena itu pencemaran lingkungan tidak dapat dihindari tetapi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengurangi, mengendalikan pencemaran serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya.

Permasalahan sampah merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh setiap kota/kabupaten di Indonesia, sehingga menjadi fokus banyak kajian (Huntari, 2015; Song, 2019). Sampah menjadi masalah penting untuk kota yang padat penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti volume sampah yang besar sehingga kapasitas daya tampung tempat pembuangan akhir atau TPA tidak mencukupi, kemudian lahan TPA semakin sempit akibat dari banyaknya pembangunan. Selanjutnya teknologi pengelolaan sampah yang tidak optimal yang mengakibatkan volume sampah semakin cepat bertambah dibandingkan dengan proses pembusukannya, pengelolaan sampah dirasa tidak memberi dampak positif terhadap lingkungan, dan kurangnya dukungan kebijakan pemerintah khususnya dalam pemanfaatan produk sampingan sampah sehingga produk tersebut menumpuk di TPA (Sudrajat, 2009).

Sebagaimana digambarkan di atas, pengelolaan sampah menjadi banyak kajian, termasuk yang dilakukan di Kabupaten Demak (Purnaweni, 2019). Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk sebesar 1,158,772 jiwa (BPS Kab Demak, 2020). Tingginya jumlah penduduk turut menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah. Berdasarkan data SIPSN (2018) jumlah sampah yang tidak terkelola sebesar 8 ton/hari dan sampah yang ditimbun di TPA sebesar 30 ton/hari. Tahun 2019, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli tercatat sampah di Kabupaten Demak yang masuk ke TPA yaitu sekitar 63 ton/hari. Jumlah sampah tersebut bertambah setiap tahunnya. Berikut ditampilkan data persentase komposisi jenis sampah di Kabupaten Demak dalam 5 tahun terakhir.

**Table 1.1 Persentase Komposisi Jenis Sampah Di Kabupaten Demak Tahun**

Tahun	Kertas (%)	Kayu (%)	Kain (%)	Karet (%)	Plastik (%)	Logam (%)	Kaca (%)	Organik (%)	Lain (%)
2015	5,50	3,00	2,00	1,00	75,0	0	2,50	5,00	6,00
2016	5,80	4,10	2,30	5,00	65,0	0	3,30	10,0	4,80
2017	5,20	4,00	2,00	4,00	67,0	0	3,00	10,0	4,80

2018	5,20	4,00	2,00	4,00	67,0	0	3,00	10,0	4,80
2019	13,94	4,07	0	5,09	22,39	0	3,05	47,83	3,63

Sumber: Open Data Kabupaten Demak.

Berdasarkan Tabel 1.1 persentase komposisi sampah yang paling banyak yaitu sampah plastik, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan sampah plastik yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengelolaan sampah plastik menjadi produk yang bernilai dan juga program pemerintah terkait pengurangan penggunaan plastik. Namun penurunan tersebut masih menempatkan sampah plastik sebagai sampah dengan persentase terbanyak dibandingkan dengan jenis sampah yang lain.

Sementara itu Kabupaten Demak baru memiliki dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu TPA Kalikondang dan TPA Candisari, yang masih memakai sistem *open dumping*. *Open dumping* merupakan salah satu sistem pembuangan sampah yang dilakukan secara terbuka, dan dinilai membahayakan karena sampah dibuang begitu saja di tempat pembuangan akhir tanpa dilakukan suatu proses ataupun penutupan tanah (Mubarak, 2009). Kabupaten Demak juga merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ancaman bencana banjir. Hal tersebut dikarenakan sebagian wilayah Kabupaten Demak berada di daerah cekungan dan kondisi tekstur tanah yang terdiri atas tekstur tanah halus (lanau) dan sedang (lempung) serta sudut elevasi wilayah mulai dari 0 m sampai dengan 100 m. Banjir tersebut juga dipengaruhi oleh adanya sampah yang tidak terangkut ke TPA yang biasanya dibuang di lahan kosong milik masyarakat dan sungai, serta masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga sampah tersebut terbawa aliran banjir.

Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan sampah terpadu perlu diterapkan sebagai penanganan dari banyaknya permasalahan sampah yang timbul di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pengelolaan sampah menurut UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Sebagian besar pengelolaan sampah di Indonesia yang masih memakai paradigma lama yaitu

kumpul-angkut-buang perlu berubah menjadi paradigma baru yaitu kumpul-pilah-olah-angkut. Paradigma baru tersebut perlu diterapkan secara komperhensif dalam pengelolaan sampah menuju zero waste yang berbasis masyarakat (Santoso, 2009). Paradigma ini juga sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 yaitu menilai sampah sebagai sumber daya yang bersifat ekonomis dan bermanfaat, sebagai kompos, energy, bahan bangunan maupun bahan baku industri lainnya.

Salah satu sumber pembiayaan dalam pengelolaan sampah dapat berasal dari retribusi. Besarnya retribusi dipengaruhi oleh kesediaan masyarakat dalam membayar jasa lingkungan untuk pengelolaan sampah. Jasa-jasa lingkungan pada dasarnya dinilai berdasarkan *willingness to pay* (WTP). Konsep ini disebut kesediaan untuk membayar atau *willingness to pay* (WTP) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan atau seberapa besar orang mau membayar untuk memperbaiki lingkungan yang rusak (Yunis, 2012). Pembentukan dan penerapan pengelolaan sampah terpadu tidak hanya didasarkan pada kesediaan masyarakat untuk membayar (WTP) tetapi juga harus didasarkan pada persepsi, sikap dan perilaku masyarakat (Rahardyan, *et al*, 2004).

Membangun kesadaran masyarakat dan membentuk perilaku yang peduli terhadap lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah, dapat dilakukan sejak dini melalui proses pembelajaran serta pembentukan karakter peduli lingkungan melalui pendidikan lingkungan hidup di Sekolah Dasar, kemudian di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Pendidikan lingkungan penting untuk dilaksanakan dalam membantu mengelola sampah karena peserta didik dapat diberikan pemahaman terkait dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Pendidikan lingkungan hidup merupakan salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga perlu dimulai dari tingkat pendidikan yang terendah agar siswa dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dari pendidikan lingkungan hidup tersebut di keluarga, sekolah, dan masyarakat (Hermawan, 2005).

Pendidikan lingkungan hidup menurut konvensi UNESCO (Syukri, 2013) adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masalah-masalah yang terkait di dalamnya serta memiliki pengetahuan, motivasi, komitmen, dan keterampilan untuk bekerja, baik secara perorangan maupun kolektif dalam mencari alternatif atau memberi solusi terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ada sekarang dan untuk menghindari timbulnya masalah-masalah lingkungan baru. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam pendidikan lingkungan hidup yaitu memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana. Selain itu juga dapat menciptakan pola perilaku yang bersahabat dengan lingkungan hidup, mengembangkan etika lingkungan hidup dan memperbaiki kualitas hidup.

Pendidikan lingkungan hidup telah dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah sejak tahun 1975 namun kegiatan tersebut masih dilakukan secara terpisah. Kemudian pendidikan lingkungan hidup disusun secara terencana pada tahun 2005 yang didasarkan atas keputusan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: Kep 07/MENLH/06/2005 dan Nomor 05/VI/KB/2005 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup yang kemudian diperbaharui menjadi kesepakatan No.03/MENLH/02/2010 dan Nomor: 01/II/KB/2010. Kemudian Depdiknas mengeluarkan surat dengan nomor 5555/C.C5/TU/05 yang berisi imbauan agar pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan diseluruh tingkat pendidikan untuk mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan. Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan amanah dari Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 05 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, dengan adanya dasar tersebut maka kebijakan pendidikan lingkungan hidup di sekolah dapat

diwujudkan melalui program adiwiyata. Program adiwiyata bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada warga sekolah agar dapat berpartisipasi dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (Tim Adiwiyata Nasional, 2011).

Sekolah adiwiyata di Kabupaten Demak sudah cukup banyak baik di tingkat SD/MI, SMP/MTS, maupun di tingkat SMA/MA, bahkan beberapa sekolah telah mendapatkan gelar sekolah adiwiyata tingkat Provinsi dan Nasional. Setiap tahunnya DLH Kabupaten Demak mendukung sekolah adiwiyata yang ada dan sekolah lain yang belum melaksanakan program adiwiyata sehingga semakin banyak sekolah yang turut melaksanakan program adiwiyata. Hal itu dikarenakan program adiwiyata di sekolah turut membantu mengatasi permasalahan lingkungan khususnya sampah di sekolah. Berikut data sekolah dasar adiwiyata di Kabupaten Demak

**Table 2.1 Daftar Sekolah Dasar Adiwiyata Kabupaten Demak**

<b>Nama Sekolah</b>	<b>Status Adiwiyata</b>	<b>Tahun Penetapan</b>
<b>SDN Batusari 6</b>	Nasional	2016
<b>SDN Batusari 5 Mranggen</b>	Nasional	2018
<b>SDN Guntur 1</b>	Provinsi	2015
<b>SDN Cabean 2 Demak</b>	Provinsi	2017
<b>SDN Wonorejo 2 Karanganyar</b>	Provinsi	2018
<b>SDN Wonoagung</b>	Provinsi	2018
<b>SDN Bandungrejo 1</b>	Provinsi	2018
<b>SDN Karanganyar 1</b>	Provinsi	2019
<b>SDN Bintoro 4 Demak</b>	Provinsi	2019
<b>SDN Bintoro 5 Demak</b>	Kabupaten	2016
<b>SDN Karangrejo 2</b>	Kabupaten	2016
<b>SDN Kebonsari</b>	Kabupaten	2016
<b>SDN Kramat 3</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Jatirogo</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Gebang 1</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Dombo</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Daleman</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Prampelan</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Kedondong 1</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Mlatiharjo</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Banjarsari 1</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Tlogosih 2</b>	Kabupaten	2017

<b>SDN Ngelokulon</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Trengguli 3</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Jogoloyo</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Ngeplikwetan 1</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Kotakan</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Jungsemi</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Tlogorejo 3</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Tegowanu 2</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Kuripan 3</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Mangunjiwan 2</b>	Kabupaten	2017
<b>SDN Kedungwaru Lor</b>	Kabupaten	2018
<b>SDN Cangkring B</b>	Kabupaten	2018
<b>SDN Jamus</b>	Kabupaten	2018
<b>SDN Karangrejo 1</b>	Kabupaten	2019
<b>SDN Bintoro 1 Demak</b>	Kabupaten	2019
<b>SDN Wringinjajar</b>	Kabupaten	2019
<b>SDN Ngaluran 2</b>	Kabupaten	2019
<b>SDN Jatimulyo</b>	Kabupaten	2019

Sumber : Data Sekunder, 2020.

Terbentuknya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kesadaran dan tanggung jawab siswa yang dimulai dari persepsi masing-masing individu terhadap kepedulian lingkungan. Persepsi merupakan proses aktifitas seseorang dalam memberi penilaian, kesan, pendapat, memahami dan menghayati terhadap suatu hal atau informasi yang diperoleh. Kepedulian lingkungan hidup merupakan sikap mental individu yang ditunjukkan dalam perilakunya dan seberapa besar seseorang menyadari permasalahan lingkungan dan berupaya untuk menyelesaikannya (Syukri, 2013). Menurut Tadkiroatun Musfiroh dalam Sulistyowati (2012) sikap dan perilaku dapat disebut juga dengan karakter. Karakter juga dapat diartikan sebagai kepribadian seseorang yang digunakan sebagai landasan cara berfikir, bertindak, dan bersikap. Karakter peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya dalam mencegah dan memperbaiki kerusakan pada lingkungan di sekitar (Listyarti, 2014). Pembentukan karakter peduli lingkungan pada siswa di sekolah sangat diharapkan agar para siswa berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepedulian dalam pengelolaan sampah pemerintah mewajibkan Provinsi serta Kota/Kabupaten untuk mengadopsi konsep bank sampah termasuk Provinsi Jawa Tengah. Hal ini di dukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Reycle melalui Bank Sampah. Bank sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Definisi bank sampah dalam buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses Unilever (2013) Bank Sampah adalah sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya seperti menampung, memilah, dan menyalurkan sampah sehingga masyarakat mendapat keuntungan dari menabung sampah. Jadi, bank sampah adalah tempat menabung sampah yang telah dipisah-pisah sesuai dengan jenisnya dan masih mempunyai nilai ekonomis. Berikut beberapa bank sampah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah.

**Table 3.1 Bank Sampah di Jawa Tengah**

<b>Nama Bank Sampah</b>	<b>Status</b>	<b>Wilayah</b>
<b>Guyup Rukun</b>	Aktif	Kabupaten Sragen
<b>Berkah Mandiri</b>	Aktif	Kabupaten Kendal
<b>Adem Ayam</b>	Aktif	Kota Semarang
<b>Aisah</b>	Aktif	Kabupaten Batang
<b>Alas Pendoro</b>	Aktif	Kabupaten Tegal
<b>Amanah</b>	Aktif	Kabupaten Magelang
<b>Amanah</b>	Aktif	Kabupaten Salatiga
<b>Anggrek</b>	Aktif	Kabupaten Wonogiri
<b>Arjuna</b>	Aktif	Kabupaten Pekalongan
<b>Anugrah Jeruk Sari</b>	Aktif	Kabupaten Jepara
<b>Rejo sari</b>	Aktif	Kabupaten Grobogan
<b>Bahagia</b>	Aktif	Kabupaten Brebes
<b>Lestari</b>	Aktif	Kabupaten Banyumas
<b>Bumi Harjo</b>	Aktif	Kabupaten Pemasang
<b>Magenta Lestari</b>	Aktif	Kabupaten Demak

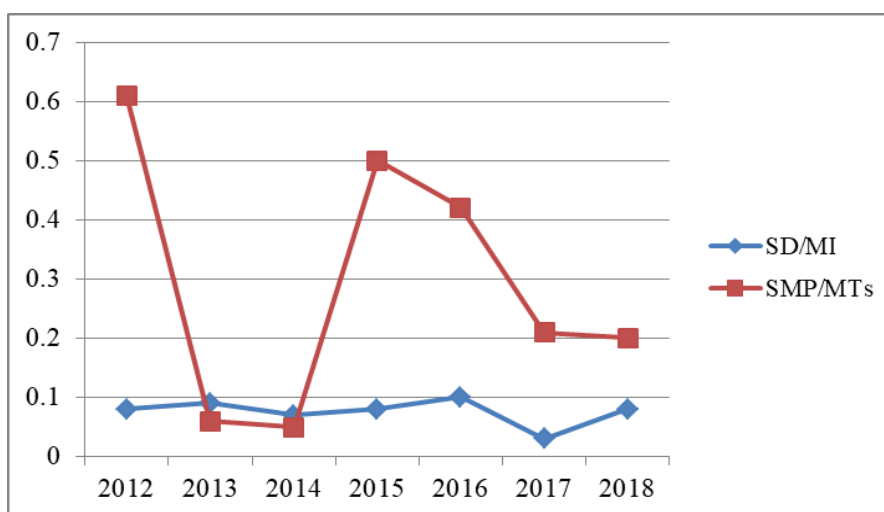


<b>Prima</b>	Aktif	Kabupaten Kudus
<b>Puri Berseri</b>	Aktif	Kabupaten Pati
<b>Rafflesia</b>	Aktif	Kota Semarang
<b>Rejo Asri</b>	Aktif	Kota Semarang
<b>Mbedayun</b>	Aktif	Kabupaten Jepara
<b>Melati</b>	Aktif	Kota Semarang
<b>Limbah Berkah</b>	Aktif	Kabupaten Kebumen
<b>Mawar</b>	Aktif	Kota Semarang

Sumber: Menlhk, 2019.

Pembentukan perilaku akan lebih melekat di dalam diri siswa apabila disertai dengan program nyata yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut. Selain program Adiwiyata yang diterapkan di sekolah, program bank sampah juga dapat dijadikan salah satu kegiatan guna membentuk perilaku peduli lingkungan di sekolah.

Selain untuk mengatasi permasalahan sampah di sekolah bank sampah juga dapat membantu perekonomian siswa dalam artian dengan adanya bank sampah siswa dapat menabung hasil penjualan sampah untuk membantu biaya pendidikan. Biaya pendidikan menjadi salah satu faktor penentu anak putus sekolah, meskipun pemerintah telah menyediakan beberapa program untuk meningkatkan partisipasi sekolah seperti Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin Daerah (BASIMDA), dan program paket A, paket B. Tahun 2018 di Kabupaten Demak masih terdapat anak putus sekolah yang jika tidak di tangani maka akan menimbulkan permasalahan sosial, meningkatnya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan serta meningkatnya jumlah pengangguran. Berikut gambaran angka putus sekolah siswa SD/MI dan SMP/MTS selama 6 tahun terakhir dari tahun 2012-2018.



### **Gambar 1.1 Grafik Angka Putus Sekolah Siswa SD/MI dan SMP/MTS**

Sumber: Profil Pendidikan Kab. Demak Tahun 2018

Dengan adanya tabungan dari hasil penjualan sampah di sekolah memungkinkan siswa untuk melanjutkan pendidikannya. Banyaknya manfaat yang didapat dengan melaksanakan bank sampah selain menjadi tabungan, bank sampah juga dapat membantu mengurangi timbunan sampah di sekolah serta dapat membentuk perilaku siswa yang peduli terhadap lingkungannya.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Melda Fitria (2015) dengan judul “Peranan Bank Sampah Sekolah di Kota Pekanbaru” menunjukkan hasil bahwa sampah yang dapat dikelola melalui bank sampah sekolah selama tahun 2013 sebesar 13.008.646 kg sampah sehingga dapat mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekolah. Selain itu bank sampah dapat menjadikan siswa peduli akan lingkungan dan menghargai nilai sampah non organik, namun program bank sampah di sekolah masih memiliki kendala dalam partisipasi nasabah untuk mengumpulkan sampah dan menyetorkannya ke bank sampah (Melda, 2015).

Sementara itu berdasarkan penelitian Adisak Singsewo dan Kamolwan Klaoklang yang berjudul *Promotion of a waste recycling bank in schools: A case study in a municipality school in Thailand* (2017) terdapat perbedaan antara pengetahuan, sikap dan perilaku siswa dalam mengelola sampah, setelah diberikan sosialisasi dengan sebelum diberikan sosialisasi. Sosialisasi ini mencakup pengetahuan dan kesadaran tentang masalah lingkungan dan literasi lingkungan, yang juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sikap, kesadaran, keterampilan pengambilan keputusan masalah lingkungan, etika lingkungan, dan partisipasi dalam pelestarian lingkungan. Namun masih terdapat siswa yang kurang disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan, karena sosialisasi dan pelatihan yang diberikan tidak ada tindak lanjutnya. Pengelolaan sampah melalui bank sampah di sekolah kurang efektif jika tidak dilakukan dengan pendidikan

lingkungan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa proses pendidikan lingkungan turut berkontribusi dalam sosialisasi bank sampah di sekolah. Penerapan pendidikan lingkungan di sekolah memberikan pembelajaran langsung kepada siswa sehingga meningkatkan partisipasi siswa dalam mengelola di sekolah (Singseewo, 2017).

Adapun hasil observasi di SD Negeri Betahwalang, SDN Karangrejo 2, SDN Jatirogo, SDN Jatimulyo, dan SDN Gebang 1, Kabupaten Demak sudah diajarkan pendidikan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan mata pelajaran, namun masih banyak dijumpai perilaku siswa yang membuang sampah sembarangan. Selain itu dapat dilihat sepanjang aliran sungai di sekitar sekolah sudah tertutupi oleh sampah dan terdapat sampah yang berserakan di lingkungan sekolah. Padahal, sekolah ini juga sudah melakukan kegiatan Bank Sampah, yang diharapkan berkontribusi pada persepsi dan perilaku siswa dalam mengelola sampah. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah di kelima Sekolah Dasar tersebut masih memiliki permasalahan khususnya pada kegiatan bank sampah.

Oleh sebab itu perlu informasi terkait persepsi dan perilaku siswa terhadap pengelolaan sampah dan pendekatan pengelolaan sampah yang lebih baik agar pelayanan bank sampah juga akan meningkat sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih. Terkait data dan penelitian yang telah dipaparkan di atas maka penting untuk dilakukan penelitian tentang model pengelolaan sampah melalui program bank sampah di lingkungan sekolah.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi siswa nasabah tabungan sampah?
2. Bagaimana persepsi dan perilaku siswa terhadap tabungan sampah di sekolah?
3. Bagaimana kesediaan membayar (WTP) warga sekolah dalam upaya pengembangan tabungan sampah di sekolah?
4. Berapa nilai yang bersedia dibayarkan warga sekolah dalam pengembangan tabungan sampah di sekolah?
5. Bagaimana hubungan prioritas faktor pengelolaan sampah di sekolah?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis karakteristik sosial ekonomi siswa nasabah tabungan sampah
2. Menganalisis persepsi dan perilaku siswa terkait tabungan sampah di sekolah
3. Menganalisis kesediaan membayar untuk menentukan potensi harga maksimum yang masih bersedia dibayarkan untuk pengembangan tabungan sampah di sekolah
4. Mengestimasi nilai kesediaan membayar warga sekolah dalam pengembangan tabungan sampah di sekolah
5. Menganalisis hubungan prioritas faktor pengelolaan sampah di sekolah

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang pengelolaan sampah di sekolah dan dapat menjadi bahan referensi/bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya pada bidang ilmu lingkungan.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup khususnya mengenai pengelolaan sampah di sekolah serta sebagai bahan masukan bagi warga sekolah dalam mengurangi timbunan sampah. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan keterampilan siswa dalam mengelola sampah.

#### 3. Manfaat Sosial

Sebagai bahan tambahan pengalaman dan pengetahuan berharga dalam penelitian khususnya bagi penulis dan para peneliti baru yang akan menjadikan karya tulis ini sebagai referensi pustaka.

### 1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dalam berbagai permasalahan yang penulis ketahui ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu diuraikan ke dalam tabel berikut:

**Table 4.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil
1.	Edeme, R.K., Nkalu, C.N, 2020, <i>Household Preferences and Willingness to Pay for Waste Management Services in Nsukka Urban Area</i>	Metode survey Analisis regresi probit untuk memperkirakan dampak faktor budaya, demografi dan ekonomi terhadap preferensi rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor demografis umur, ukuran rumah tangga dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesediaan rumah tangga untuk menuntut pengelolaan sampah di wilayah perkotaan Nsukka</li> <li>2. Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap permintaan jasa pengelolaan sampah sedangkan kepemilikan rumah berpengaruh tidak signifikan terhadap preferensi dan kesediaan rumah tangga untuk membayar jasa pengelolaan sampah</li> </ol>
2.	Qingbin Song, Zhishi Wang, Jinhui Li, 2016 <i>Residents' Attitudes and Willingness to Pay for Solid Waste in Macau</i>	Metode regresi logistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat Macau memiliki kesadaran lingkungan yang relatif baik. Mengenai kualitas lingkungan, sebesar 92,4% responden merasa puas terhadap situasi lingkungan saat ini.</li> <li>2. Sebagian besar responden (95,7%) bersedia memilah sampah di rumah, jika pemerintah meminta mereka melakukannya. Sebagian besar responden (85,4%) juga memberikan jawaban positif untuk pertanyaan tentang WTP.</li> <li>3. Hasil survei mendukung hipotesis bahwa probabilitas</li> </ol>

			responden mengatakan 'ya' untuk pertanyaan WTP meningkat sesuai dengan tingkat pendidikan. WTP bulanan rata-rata adalah 38,5 MOP per rumah tangga dan WTP tahunan sekitar 79,7 juta MOP untuk seluruh area Macau
3.	Qingbin, Song., Zhao, S., Lam, I., Zhu, L., Yuan, W., Wang, C, 2019, <i>Understanding Residents and Enterprises' Perceptions, Behaviors, and Their Willing to Pay for Resources Recycling in Macau</i>	Metode survey Analisis Regresi Contingent Valuation Method	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penduduk menganggap limbah padat sebagai masalah lingkungan terpenting kedua di Makau. Mayoritas (75,34%) menyatakan bahwa sumber daya sampah tidak dikelola dan didaur ulang secara efektif dan 53,23% mengaku tidak memisahkan bahan daur ulangnya untuk didaur ulang</li> <li>2. WTP dianggap positif oleh 56,45% responden, dengan nilai rata-rata pembayaran yang dapat diterima per rumah tangga sebesar 33,16 MOP bulan</li> <li>3. WTP meningkat seiring dengan tingkat pendapatan responden, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan.</li> </ol>
4.	Han, Z., Zeng, D., Li, Q., Cheng, C., Shi, G., Mou, Z, 2019, <i>Public Willingness to Pay and Participate in Domestic Waste Management in Rural Areas of China</i>	Metode Statistik CVM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyek percontohan dan kesadaran masyarakat tentang perlunya pengolahan limbah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap WTP dan WTPP</li> <li>2. Persepsi pencemaran lingkungan dapat meningkatkan WTP secara signifikan tanpa mempertimbangkan faktor lain.</li> <li>3. Pendidikan memiliki</li> </ol>

---

			<p>pengaruh positif yang signifikan dan korelasi yang tinggi dengan WTP dan WTPP</p> <p>4. WTP publik dan kemauan untuk mengirimkan sampah menurun secara eksponensial dengan kenaikan biaya layanan dan jarak pengiriman. Kesiediaan publik untuk bekerja sebagai pembersih menunjukkan pertumbuhan logaritmik seiring dengan meningkatnya upah yang diharapkan</p>
5.	<p>Tassie, Kassahun., Birara, Endalew 2020</p> <p><i>Willingness to pay for improved solid waste management services and associated factors among urban households: One and one half bounded contingent valuation study in Bahir Dar city, Ethiopia</i></p>	<p>Metode Deskriptif dan ekonometrik logit biner</p>	<p>1. Variabel tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, jumlah sampah yang dihasilkan per minggu, akses ke layanan pengelolaan sampah, dan tanggung jawab responden terhadap pengelolaan sampah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan membayar atau variable WTP.</p> <p>2. Sebanyak 86,3% rumah tangga sampel bersedia membayar untuk layanan pengelolaan sampah yang lebih baik.</p> <p>3. Nilai rata-rata WTP sebesar 13,10 ETB/bulan dengan total WTP 49458 ETB/bulan yang jauh lebih tinggi dari jumlah uang yang dikumpulkan oleh kotamadya Bahir Dar (335.000 ETB/bulan)</p>

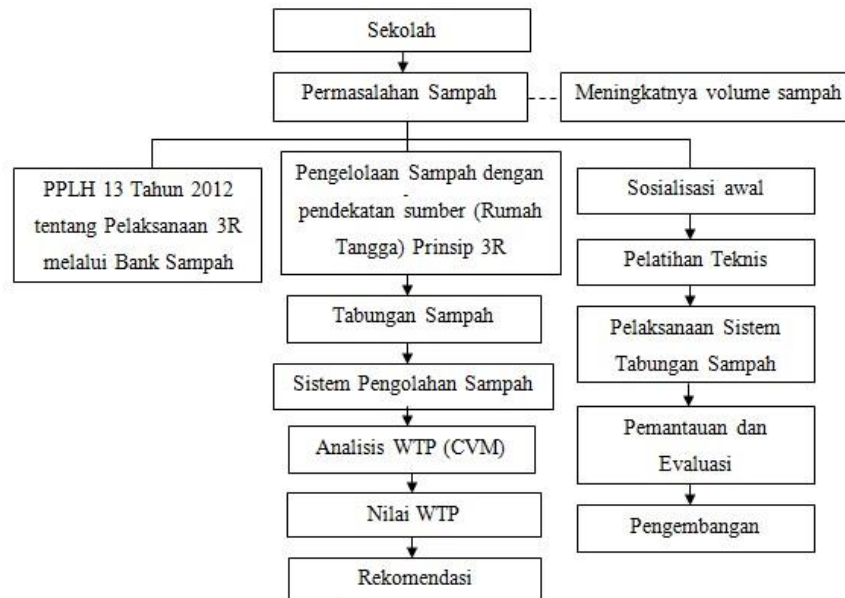
---

## 1.6 Kerangka Berpikir

Permasalahan sampah di sekolah dapat disebabkan karena meningkatnya volume sampah yang tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu diperlukan

pengelolaan sampah yang efektif di sekolah seperti pengelolaan dengan prinsip 3R dapat berupa bank sampah atau tabungan sampah yang diawali dengan sosialisasi awal. Pengelolaan sampah melalui bank sampah di sekolah ini lebih menyenangkan dan lebih menarik minat siswa untuk berpartisipasi dalam proses menabung sampah. Siswa lebih aktif dalam menjual sampahnya di tabungan sampah dan menabung hasil dari penjualan tersebut membuat bank sampah harus terus berkembang. Pada akhirnya perkembangan bank sampah dapat meningkatkan minat siswa dalam menabung sampahnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



SEKOLAH PASCASARJANA  
Gambar 2.1 Bagan Alur Kerangka Pikir Penelitian